**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan memiliki kontribusi begitu penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa secara utuh dipengaruhi oleh adanya pendidikan. Pendidikan bukan hanya berpengaruh secara langsung kepada produktivitas, namun akan berpengaruh kepada fertilitas masuarakat. Sumber daya masyarakat yang berpendidikan akan lebih siap dalam memahami dan menghadapi transisi di lingkungan kerja. Maka bukanlah keanehan jika suatu negara berpenduduk dengan tingginya tingkat pendidikan akan naik pula pertumbuhan ekonomi.[[1]](#footnote-1)

Pada umumnya, dengan meningkatkan wawasan, kreatifitas, kemampuan, perilaku, dan produktivitas adalah kontribusi pendidikan atas pembangunan sosial ekonomi. Pendidikan juga berkontribusi terhadap perkembangan tekhnologi dalam kemajuan bidang sosial dan ekonomi di masyarakat secara umum, dikarenakan kontribusinya yang besar dan dapat di terima dalam berbagai aspek. Pendidikan dipercaya merupakan investasi bidang SDM. Oleh karena itu, seyogyanya pengembangan pendidikan haruslah diperhatikan secara lebih oleh setiap kehidupan berbangsa.[[2]](#footnote-2)

Islam sangat memperhatikan bagaimana pengajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut ditegaskan dalam pedoman umat Islam yang memberikan jaminan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam perspektif Al Qur’an pendidikan adalah upaya strategis dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, maka dari itu, menjadi perhatian besar bagi agama Islam atas pentingnya pendidikan. Ayat tersebut difirmankan oleh Allah SWT.

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥

Artinya: *“1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” [[3]](#footnote-3)*

Berdasarkan firman diatas, dengan piranti baca tulis, Allah mengajarkan kepada manusia, yaitu memerintahkan kepada manusia untuk membaca agar manusia dapat mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Dalam hal ini manusia diwajibkan untuk mengenyam pendidikan. Terdapat beberapa komponen Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah.

Komponen pendidikan itu adalah unsur-unsur yang menentukan ada tidaknya serta tercapai atau tidaknya proses pendidikan itu. Unsur-unsur itu meliputi *outcomes, environmental, output, process, input, raw input* dan  *instrumental input*. Kesemua unsur tersebut memiliki peran masing-masing dengan beriringan menjalankan peran yang terstruktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Komponen itu sendiri adalah suatu elemen dari sistem yang berperan dalam keberlangsungan suatu proses dalam menggapai tujuan. Komponen-komponen pendidikan setidaknya terdiri dari: 1) tujuan; 2) pendidik; 3) anak didik; 4) kurikulum; 5) metode; 6) buku teks siswa dan guru; 7) pembiayaan; 8) ruang kelas; 9) perangkat keras; dan 10) kegiatan.[[4]](#footnote-4)

Sesuai dengan komponen-komponen pendidikan itu, peneliti akan memfokuskan pada komponen pembiayaan. Dalam pengelolaan pendidikan, pembiayaan adalah satu dari berbagai sumber daya yang mendukung secara langsung keefektifan serta keefisiennya. Sekolah dituntut untuk dapat mengelola data dengan transparant, yaitu dengan merencanakan, mengaplikasikan, mengevaluasi serta pertanggungjawabannya. Pada pelaksanaan pendidikan diantara unsur yang sangat urgen adalah adanya pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan haruslah dikelola secara optimal sehingga dapat meningkatkat kualitas dari pendidikan itu sesuai dengan harapan. Karenanya perlu menjadikan perhatian yang lebih terhadap pembiayaan pendidikan, yang mana yang menjadi perhatian utama dalam pembiayaan pendidikan adalah tercapainya visi dan misi sekolah.[[5]](#footnote-5) Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan diterimanya pendapatan keuangan yang diperoleh sekolah dari dana APBN, APBD dan masyarakat atau orang tua.serta digunakannya dalam membiayai setiap program pendidikan yang dirancang.[[6]](#footnote-6)

Fungsi pembiayaan adalah bagian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Maka dari itu, pembiayaan adalah persoalan fundamental, dimana mengharuskan untuk diperhatikan serta diselesaikan dengan berbai solusi dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Akan menjadi hambatan bagi lembaga penyelenggara pendidikan jika tidak mampu mengelola pendanaan pendidikan dalam operasionalisasi penyelenggaraan pendidikannya. Akan tetapi bukanlah suatu kepastian bahwa pendanaan pendidikan yang memadahi akan berhasil pula penyelenggaraan pendidikan. [[7]](#footnote-7) Terdapat faktor lain yang juga harus diperhatikan. Maka sangat perlu untuk mengerti berbagai permasalahan yang ada dan solusinya.

Pembiayaan pendidikan secara umum adalah problem kompleks yang terdiri dari komponen yang berkaitan. Dan mempunyai bidang bersifat Mikro yaitu dalam Satuan pendidikan sampai pada bidang Makro yaitu Nasional, terdiri dari berbagai sumber pendidikan, struktur alokasi dan prosedur alokasi. Selain itu faktor keefisienan dan keefektifan pada pendayaguna serta akuntabilitasnya dan perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah merupakan permasalahan-permasalahan yang masih menjadi perhatian dalam pembiayaan pendidikan.[[8]](#footnote-8) Berkenaan jenjangnya, pembiayaan pendidikan dilaksanakan pada beberapa tempat, yaitu lembaga satuan pendidikan (sekolah), pengguna jasa pendidikan (orang tua, siswa), dan administrator pendidikan mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi hingga pusat.[[9]](#footnote-9)

Pembiayaan pendidikan didapat dari Pemerintah baik pusat atau daerah, serta masyarakat.[[10]](#footnote-10) Seperti anggaran Pemerintah, bantuan PEMDA, pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan sumber lain yang sah.

Pada PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan pada pasal 3 dijelaskan: (1) Biaya pendidikan meliputi: a) Biaya satuan pendidikan;b) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c) Biaya pribadi peserta didik. (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a) biaya investasi: b) biaya operasi; c) Bantuan biaya pendidikan; dan d) beasiswa. (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a) biaya investasi; b) biaya operasi. (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi: a) biaya personalia satuan pendidikan;b)Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan pembiayaan pendidikan diperlukan manajemen pengelolaan pembiayaan yang dikenal dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen merupakan ilmu yang berkaitan dengan upaya mengelola organisasi agar dapat merealisasikan tujuan yang ditargetkan. Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan manajemen yang diterapkan dalam konteks pendidikan. Hal ini dapat dipahami dari lingkup/pendekatan terhadap manajemen pendidikan. Oleh karena itu, perspektif dalam ilmu manajemen juga berpengaruh pada perspektif dalam melihat administrasi manajemen pendidikan.[[12]](#footnote-12)

Manajemen Pembiayaan sekolah merupakan hal penting dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan.

Terdapat sedikitnya 2 alasan utama dalam pembiayaan organisasi yang merupakan aktivitas perencanaan diantaranya: perkiraan serta perencanaan pembiayaan organisasi yang dikomunikasikan oleh organisasi tersebut. Tahap awal dengan memfokuskan perihal pembiayaan dalam organisasi selanjutnya melakukan evaluasi pada pelaksanaan anggarannya. Untuk dapat mengurangi terjadinya penyelewengan terhadap kebijakan dan korupsi yang seringkali menjadi momok dalam pendidikan, maka dalam mengelola pembiayaan di sekolah harus dilaksanakan secara terbuka. Hal tersebut menjadi prioritas tatkala pembiayaan yang diperoleh dari orang tua peserta didik atau masyarakat.[[13]](#footnote-13)

Manajemen pendidikan adalah aspek yang mesti terkait dalam kajian pendidikan, tak terkecuali pada bidang penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di sekolah. Terdapat berbagai pendapat yang berbeda oleh para ahli manajemen mengenai kegiatan manajerial, akan tetapi terdapat kesamaan yang terkandung didalamnya.[[14]](#footnote-14)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Fayol | GR Terry | LH Gulick | Kontz O Donnel |
| 1 | *planning* | *Planning* | *planning* | *planning* |
| 2 | *organizing* | *organizing* | *organizing* | *organizing* |
| 3 | *comanding* | *actuanting* | *stafing* | *stafing* |
| 4 | *coordinating* | *Controlling* | *directing* | *leading* |
| 5 | *controlling* |  | *coordinating* | *controlling* |
| 6 |  |  | *reporting* |  |
| 7 |  |  | *budgeting* |  |

Selanjutnya Matin mengungkapkan manajemen pembiayaan meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi berikut LPJ keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran.[[15]](#footnote-15) Pembiayaan pendidikan pada prinsipnya juga terdapat dalam ayat suci Al-Quran seperti pada firman Allah surat Al Mujadallah ayat 11-13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٢ ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٣

Artinya: *“11. Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, 12. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, 13. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [[16]](#footnote-16)*

Penganggaran merupakan suatu prosedur yang dilaksanakan dalam memutuskan tindakan untuk mengatur penggunaan sumber daya di waktu mendatng. Ada dua tahapan pokok dalam merancang anggaran pendidikan: 1) mengelaborasi paket keputusan yang terdiri dari analisis serta uraian tiap kegiatan yang berlainan menjadi satu atau beberapa paket keputusan, dan 2) memberikan peringkat prioritas pada paket keputusan yang meliputi penilaian, analisis biaya atau subjektifitas penilaian.[[17]](#footnote-17)

Dalam proses pendidikan, perencanaan pendidikan memiliki kedudukan strategis. Adanya perencanaan tersebut akan mengarahkan jalannya pendidikan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karenanya seorang perencana pendidikan diharuskan mempunyai pengetahuan luas dan kemampuan sehingga dapat rancangan yang disusunnya akan dapat menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan selanjutnya. Berbagai kekuatan harus dapat terdeteksi dalam rancangan tersebut berikut kelemahan, peluang, serta ancaman (SWOT).[[18]](#footnote-18)

Pada prinsipnya lembaga-lembaga pendidikan islam dalam proses perencanaan anggaran pendidikan senantiasa mengacu pada firman Allah SWT. yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Berikut disajikan beberapa firman Allah SWT. Mengenai perencanaan dalam Al-Qur’an Surat Al Hajj ayat 77:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ ٧٧

Artinya*: “Hai orang-orang yang beriman, ruku´lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” [[19]](#footnote-19)*

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana kita harus merencanakan agar menghasilkan sesuatu yang maksimal yaitu menjadi orang yang beruntung. Selain ayat tersebut Al-Quran juga mengajarkan kita untuk melakukan perencanaan yaitu Al Qur’an surat An Nahl ayat 90:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya*: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” [[20]](#footnote-20)*

Berdasarkan ayat tersebut terdapat anjuran melaksanakan kebaikan serta menjauhi keburukan. Allah mengajarkan kepada kita agar dapat mempelajarinya, oleh sebab itu dalam meraih tujuan yang dirancang dengan baik, maka dalam melakukan suatu kegiatan dibutuhkan perencanaan matang.

Dalam merancang anggaran diperlukan proses yang bertahap. Tahap-tahap perencanaan meliputi rumusan dari berbagai tindakan yang diperlukan untuk meraih hasil yang diharapkan sesuai rencana. Pada penelitian ini langkah-langkah perencanaan adalah:

1. *Forecasting* (peramalan)

Peramalan merupakan kegiatan memperkirakan, memproyeksikan, atau menafsirkan setiap potensi yang mungkin timbul pada waktu yang akan datang sebelum rencana yang lebih pasti dilakukan.

1. *Establishing objective* (penetapan tujuan)

Identifikasi terhadap berbagai tujuan yang hendak diraih. Menggolongkan berbagai tujuan berdasar dengan aspek kepentingan, spektrum, jangkauan, dan tingkatan lembaga pendidikan. Penetapan tujuan adalah kegiatan dalam memutuskan sesuatu yang hendak diraih. Tujuan pendidikan sekolah dalam hal ini tercermin pada visi dan misi sekolah.

1. *Policy* (perumusan kebijakan)

Policy yaitu perumusan kebijakan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam langkah ini adalah identifikasi pada setiap kegiatan yang ada di sekolah. Kegiatan yang diidentifikasi di sekolah, bisa merupakan kegiatan yayasan (jika sekolah swasta), kegiatan kepala sekolah, kegiatan guru, kegiatan peserta didik, kegiatan orangtua dan kegiatan masyarakat. Semua kegiatan tersebut adalah yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan sekolah.

1. *Programming* (pemrograman)

*Programming* (pemrograman) adalah seleksi atas setiap kegiatan yang telah dilakukan pada langkah policy (perumusan kebijakan)

1. Prosedur merumuskan langkah-langkah

Prosedur yang dimaksud disini adalah merumuskan langkah-langkah yang berarti pada setiap kegiatan yang diseleksi sebelumnya dalam langkah programing atau pengurangan tersebut diberikan peringkat, mana kegiatan yang dilakukan terlebih dahulu dan kegiatan yang selanjutnya.

1. *Developing procedure* (pengembangan prosedur)

Mengembangkan prosedur kegiatan dengan memformulasikan dan mengembangkan metode yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan prosedur dilaksanakan dengan menerapkan standar normal pelaksanaan kegiatan

1. *Scheduling* (penjadwalan)

Schedule adalah berbagai kegiatan yang terprioritas tersebut diberikan jadwal. Jadwal tersebut ditetapkan bertujuan agar kegiatan telah terperingkat dapat dilaksanakan secara konkret. Kapan dilakukan, siapa yang mempertanggungjawabkan dan siapa dilibatkan dalam kegiatan itu.

1. *Budgeting* (penganggaran)

*Budgeting* yang dimaksud disini adalah penganggaran atau pembiayaan. Ada dua aktivitas dalam penganggaran, yaitu penentuan sumber anggaran dan alokasi anggaran.[[21]](#footnote-21)

Pada seluruh aspek kegiatan di sekolah tentu saja sangat memerlukan biaya, oleh sebab itu diperlukan pembiayaan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan harus memuat kebijakan persetujuan pembiayaan yang mencakup:

* 1. konsep humargin total permohonan pembiayaan
  2. penetapan batas wewenang pembiayaan
  3. tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan
  4. proses persetujuan pembiayaan
  5. perjanjian pembiayaan
  6. persetujuan pencairan pembiayaan

1. Konsep pembiayaan

Persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan.

1. Penetapan batas wewenang persetujuan pembiayaan

Ini harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk

1. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan

Yaitu memastikan bahwa:1) setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan dan azas-azas pembiayaan; 2) Pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan; 3) pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur objektif, cermat, dan seksama serta independen; 4) meyakinkan bahwa pembiayaan tidak akan bermasalah

1. Perjanjian pembiayaan

Perjanjian dibuat secara tertulis, bentuk, format ditetapkan dan minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) memenuhi aspek legalitas yang dapat melindungi kepentingan organisasi; 2) memuat jumlah jangka waktu, tatacara, pembayaran kembali pembiayaan serta syarat pembiayaan lainnya.

1. Persetujuan pencairan pembiayaan

Hendaknya didasarkan pada prinsip: 1) hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan; 2) sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis berkaitan dengan pembiayaan telah selesai dan telah memberikan perlindungan yang memadai organisasi.[[22]](#footnote-22) Pembiayaan sekolah diperoleh dari berbagai sumber, dana biasanya sumber dana yang didapat yakni:

1. Dana dari pemerintah
2. Dana dari orang tua siswa
3. Dana dari masyarakat
4. Dana dari alumni
5. Dana dari peserta kegiatan
6. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah

Pengelolaan pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara berdaya guna dan dengan kebijakan yang sah. Tindakan yang berdaya guna dapat diukur dari kemampuan menggunakan sumber daya yang efisien untuk memperoleh hasil yang maksimal, sedangkan kebijaksanaan yang sah berarti pengelolaan keuangan yang ditetapkan harus bertolak dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dana yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pandangan agama Islam memerintahkan bahwa: segala sesuatu harus dilakukan secara sistematis, terinci, benar, dan tertib. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Mudasir ayat 38 mengenai kewajiban untuk bertanggung jawab yaitu:

كُلُّ نَفۡسِۢ بِمَا كَسَبَتۡ رَهِينَةٌ ٣٨

Artinya*: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” [[23]](#footnote-23)*

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk bertanggung jawab atas segala yang diperbuat.

Dalam melakukan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan keuangan pendidikan, keuangan pendidikan tersebut harus digolong-golongkan menurut suatu aturan tertentu yang baku, dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan harus diringkas dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan ini yang disebut akuntasi dalam pembiayaan pendidikan. Membuat akuntansi keuangan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun transaksi keuangan tidak diatur dalam suatu peraturan, namun pertanggung jawaban keuangan dituntut dengan akuntansi yang jelas dan mudah dipahami.[[24]](#footnote-24) Aspek akuntasi ini merupakan yang sangat penting, akuntasi keuangan meliputi:

1. Neraca, laporan sumber dan penggunaan dana

Neraca adalah laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu yang menunjukkan jumlah aktiva, utang, dan modal dari perusahaan tersebut. Laporan sumber dan penggunaan dana adalah laporan mengenai dari mana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan usahanya dan untuk apa dana tersebut digunakan pada suatu periode tertentu.

1. Analisis neraca

Pada dasarnya penilaian terhadap pembaca adalah membandingkan laporan raja beberapa periode minimal 2 periode. Untuk menilai neraca perusahaan, kita mengenal beberapa analisis yang masing-masing punya kegunaannya sendiri. Supaya terdapat keseragaman dalam cara analisis neraca untuk semua cabang maka analisis yang digunakan adalah: Analisis horizontal, Analisis vertikal, Analisis per pos neraca.

1. Analisis rugi laba

Cara melakukan analisis rugi-laba sama dengan analisis neraca yaitu menggunakan analisis vertikal, analisis horizontal, dan analisis unsur rugi-laba.

1. Analisis sumber dan penggunaan dana

Analisis sumber dan penggunaan dana dimaksudkan untuk mengetahui dari mana perusahaan memperoleh dana dan untuk apa dana tersebut digunakan dalam suatu periode tertentu. Analisis sumber dan penggunaan dana ini sangat penting karena dengan ini perusahaan dapat mengetahui: 1) Kebijakan pembelanjaan yang diambil perusahaan pada periode yang bersangkutan; 2) Perubahan pos-pos fast aktiva dan perubahan pos-pos utang dan modal dalam neraca yang menunjukkan bertambah atau berkurangnya modal kerja.

1. Analisis rasio

Analisis rasio adalah analisis tentang keterkaitan antara satu pos atau grup rekening lain pada laporan keuangan costumer. Tujuan analisis rasio yaitu analisis pelengkap dalam analisis keuangan nasabah dan merupakan satu dari dasar guna memutuskan yaitu dalam kaitannya dengan penelitian keadaan keuangan costumer.

1. Proyeksi laba

Proyeksi laba merupakan rancangan atau target keuntungan pada perusahaan di periode tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut maka proyeksi laba terdiri dari tiga kelompok yaitu: Pendapatan, biaya dan laba.

1. Analisis *Cash Generation*

Analisis cash generation digunakan untuk seorang account officer ketika menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang kondisi keuangan di perusahaan pada waktu mendatang, diantaranya: 1) Apakah upaya bersangkutan adalah wajar biaya, 2) Bagaimana kapasitas perusahaan dalam menggantikan fixed asset, 3) Seberapa besar kapasitas perusahaan mengatasi debt service, 4) Seberapa besar perusahaan dapat membiayai dividen, 5) Bagaimana pengembangan yang dijalankan dihubungkan terhadap kapasitas cash generation.

1. Proyeksi kas

Cash flow merupakan deskripsi atas kesemua rencana pendapatan serta pengeluaran uang kas perusahaan tertentu pada beberapa periode. Cash flow begitu berarti baik dalam analisis atau pengawasan pada pembiayaan. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami lebih dulu dalam penyusunan cash flow yaitu disusun dengan cash basis (basis tunai). Cash basis merupakan pemasukan diakui ketika uang tunai didapat bukan ketika penjualan dilaksanakan, berbagai biaya diakui ketika bank tunai dikeluarkan bukan ketika biaya timbul.[[25]](#footnote-25)

Selanjutnya pada pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk menolong bendahara guna menerima, menggunakan, menyimpan keuangan dilaksanakan secara efisien, benar serta sah. Melaksanakan pengawasan tak diperkenankan dilaksanakan dengan sekedar bertujuan mengorek berbagai kesalahan dari seorang bendahara atau pimpinannya di lembaga, namun memfokuskan pada kegiatan membimbing dan menunjukkan bagaimana dalam mengelola keuangan. Maka dari itu, seyogyanya pengawasan pada bidang keuangan dilaksanakan secara preventif dan kuratif. Pengawasan yang bersifat preventif oleh atasan ditujukan guna mencegah adanya penyalahgunaan keuangan berupa kegiatan membimbing serta menunjukkan pada bagaima mengelola keuangan. Pengawasan yang bersifat kuratif yaitu upaya dalam menjalankan pengamanan dari penyalahgunaan dana. Pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan juga dapat dijalankan dengan cara menyampaikan pertanggungjawaban tertulis oleh seorang bendahara tentang pendapatan serta biaya pengeluaran. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan juga dapat dijalankan dengan melaksanakan pemeriksaan pada pembukuan serta penyimpanan berikut penggunaan biaya oleh seorang bendahara secara langsung.

Kebijakan pembiayaan harus dimanage dan cantumkan bagian pengawasan pembiayaan, meliputi:

* 1. Prinsip dari pengawasan pembiayaan

1. Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan
2. Pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan
3. Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan
   1. Objek dari pengawasan pembiayaan
4. Semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan
5. Semua jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait
   1. Lingkup fungsi pengawasan pembiayaan yaitu memonitor serta mengawasi:
6. Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
7. Perkembangan kegiatan costumer secara off-site dan on-site dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan kegiatan yang berisiko
8. Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan
9. Pembinaan kepada costumer
10. Secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan costumer costumer besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku.
11. Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan
12. Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan
    1. Struktur pengendalian internal pembiayaan

Struktur pengendalian internal pembiayaan harus mempunyai struktur pengendalian internal yang memadai dalam pembiayaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang

* 1. Lingkup struktur pengendalian internal pembiayaan

1. Penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap tahap proses pemberian pembiayaan yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan perusahaan
2. Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan pembiayaan harus memadai
3. Adanya mekanisme deteksi dini terhadap setiap pelanggaran terhadap kebijakan pemberian pembiayaan dan prosedur pelaksanaan pembiayaan.
   1. Kajian periodik

Efektivitas sistem pengendalian internal pembiayaan wajib melakukan kegiatan berkala atas sistem pengendalian internal pembiayaan.

* 1. Pengawasan esensial

Dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya dan mempertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang

* 1. Audit internal pada pembiayaan

1. Merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah dilakukan dengan benar, sesuai dengan kebijakan dan telah memenuhi prinsip pembiayaan yang sehat, serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan
2. Pelaksanaan harus mengacu pada standar pelaksanaan fungsi audit internal.[[26]](#footnote-26)

Pada kebijakan pengecekan pembiayaan harus pula dimanage dan cantumkan prosedur penyelesaian pada pembiayaan yang bermasalah yaitu:

1. Pendekatan pembiayaan bermasalah
2. Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya pembiayaan bermasalah
3. Harus menyeleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah
4. Penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin.
5. Tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara plafondering
6. Tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group.
7. Pembiayaan dengan pengawasan distingtif
8. Setiap bulan wajib menyusun daftar atas kualitas
9. Selanjutnya mengawasi secara khusus menyediakan pembiayaan yang termasuk dalam bahasa sunda yang bermasalah dan segera melakukan penyelesaiannya
10. Evaluasi pembiayaan bermasalah

Wajib melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus dan hasil penyelesaiannya serta menghitung presentasi terhadap total pembiayaan.

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitas yang tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai presentasi tertentu dari benda yang secara keseluruhan atau wajib.

1. Diketahui membuat lembaran pembiayaan bermasalah secara tertulis
2. Membuat satuan kerja kelompok tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah
3. menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah
4. Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah
5. mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah
6. Penyelesaian pada pembiayaan yang tidak bisa ditagih. upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:
7. Satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada direksi
8. Satuan kerja melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui direksi
9. daftar pembiayan yang tidak dapat ditagih, cara, dan pelaksanaan penyelesaiannya wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada direksi dan komisaris untuk kemungkinan dibawa ke RUPS.[[27]](#footnote-27)

Selain itu, juga Allah Berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Infithaar ayat 10-12 yaitu:

وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ ١٠ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ١١ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ ١٢

Artinya*: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 11. yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [[28]](#footnote-28)*

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah selalu mengawasi apa yang kita kerjakan, karena Allah maha mengetahui segala yang kita kerjakan, sehingga kita harus melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang baik dapat mewujudkan mutu pendidikan lebih baik. Pendidikan bermutu kerap kali diisyaratkan sebagai situasi yang baik, cukup kriteria, dan semua aspek yang ada pada pendidikan, aspek itu diantaranya masukan, proses, keluaran, biaya, sarpras dan tenaga kependidikan. Pendidikan bermutu juga juga termasuk dalam faktor yang menentukan kapabilitas suatu bangsa, pendidikan yang bermutu harus dapat bertahan pada masa globalisasi.[[29]](#footnote-29)

Salah satu sasaran pembangunan bidang pendidikan nasional adalah adanya upaya peningkatan mutu pendidikan, upaya tersebut adalah divisi integral dari usaha dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Guna mewujudkan meningkatnya mutu pendidikan harus diupayakan dengan berlandaskan pada pelaksanaan yang terencana.[[30]](#footnote-30)Mutu dari pendidikan kerap mengarah terhadap mutu lulusannya, namun jika tanpa adanya sistem pendidikan yang juga bermutu, lulusan (*output*) bermutupun tak dapat terwujud tercapai.[[31]](#footnote-31)

Peningkatan mutu pada pendidikan didapatkan dengan dua skema: (1) orientasi akademis pada upaya peningkatan mutu pendidikan, guna memberi standar minimal bagi proses yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan mutu pendidikan yang telah menjadi syarat tuntutan majunya zaman; (2) orientasi keterampilan hidup esensial pada peningkatan mutu pendidikan, meliputi pendidikan berasas luas, jelas, dan substansial.[[32]](#footnote-32) Kualitas pendidikan bisa diketahui melalui aspek proses serta produknya. *Pertama*, input atau masukan sangat mempengaruhi mutu pendidikan dilihat dari aspek proses. PBM bisa disebut efektif jika ketika PBM dilaksanakan, peserta didik menempuh proses pembelajaran berarti. *Kedua*, pendidikan merupkan mutu dari aspek produk, apabila peserta didik mengindikasikan adanya tanda pengertian tinggi pada berbagai tugas belajar, hasil dari pendidikannya relevan terhadap kebutuhan hidup serta relevan terhadap tuntutan perkembangan lingkungan, utamanya pada kehidupan kerja.[[33]](#footnote-33)

Sebagaimana yang dikutip Arcaro, mengembangkan 14 perkara yang mengembangkan mutu dalam pendidikan, antara lain:

1. Menciptakan konsistensi tujuan. Mencipkan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia.
2. Mengadopsi filosofi mutu total. Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif dan hal tersebut dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Amerika kalah dalam keunggulan kompetitif. Sistem sekolah mesti menyambut baik tantangan untuk kompetisi dalam sebuah perekonomian global. Setiap anggota sistem sekolahmesti belajar keterampilan baru untuk mendukung revolusi mutu.
3. Mengurangi kebutuhan pengujian. Mengurangi kebutuhan pengujian dan insfeksi yang berbasis produksi masal dilakukan untuk membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.
4. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan.
5. Memperbaiki mutudan produktivitas serta mengurangibiaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melembagakan proses. Prakteknya adalah dengan memperbaiki, mengidentifikasi maka rantai kostumer atau pemasok mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, mengimplementasi perubahan, menilai dan mengukur hasilnya, mendokumentasikan serta standarisasi proses.
6. Belajar sepanjang hayat. Hal tersebut disebabkan mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Maka dari itu, perlu digalakkan belajar sepanjang hayat sebagai indikator mutu.
7. Kepemimpinan pendidikan. Harus mempunyai kepemimpinan pendidikan yang bisa mengejawantakan mutu kedalam visi dan misi lembaga.
8. Mengeleminasi rasa takut. Bekerja harus dilakukan dengan kesadaran, bukan dilakukan dengan pijakan rasa takut.
9. Mengeleminasi hambatan keberhasilan. Salah satu karakter mutu adalah sangat minimnya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi sekolah harus mengembangkan strategi khusus untuk menghadapi hambatan tersebut.
10. Menciptakan budaya mutu. Prinsip yang baik dalam menerapkan mutu adalah menciptakan budaya mutu, agar setiap orang mempuyai tanggung jawab dibidangnya.
11. Perbaikan proses. Hal tersebut dikarenakan tidak proses yang sempurna, maka setiap proses hendaknya dievaluasi dan dicari solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.
12. Membantu siswa berhasil. Dorongan dan bantuan yang ditunjukkan kepada siswa harus selalu didengungkan tanpa pandang bulu, terlebih lagi siswa yang berprestasi.
13. Komitmen. Manajemen mesti memiliki komitmen terhadap budaya mutu.
14. Tanggung jawab.[[34]](#footnote-34)

Selanjutnya berdasarkan hasil prasurvei peneliti melalui wawancara pada tanggal 8 Desember 2016 yang dilakukan dengan Kepala Sekolah, Bendahara, dan guru TK, SD, SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah, ditemukan bahwa:

1. Perencanaan pembiayaan yang dilakukan SekolahIslam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah telah mengacu pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), pada proses perencanaan melibatkan guru, staff TU, Orang Tua, Komite sekolah, serta *stakeholder* yang terkait dan dilaksanakan secara terencana dan tersistematis dengan baik. Sekolah mempunyai Rencana Kerja Sekolah (RKS) secara terpadu yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan mutu pendidikan dan dipetakan untuk jangka waktu menengah (4tahun). Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan RKS untuk jangka waktu 1 tahun, dilaksanakan secara transparan, terpadu, berdasarkan skala prioritas, partisipatif dan akuntabel.
2. Pembiayaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar bersumber pada 1) Donatur PT. GGP; 2) Peningkatan tabungan siswa: kegiatan gemar menabung dan berinfak (hasil pengembangan tabungan siswa untuk perbaikan fisik gedung sekolah dan lainnya); 3) Donatur-donatur tidak mengikat; 4) Sumbangan perusahaan-perusahaan; 5) Sumbangan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 6) Penggalian dana dari orang tua murid melalui peningkatan SPP khususnya orang tua murid diluar karyawan GGP. Perlu dilakukan klasifikasi orang tua murid diluar GGP, karena SPP masih disertakan dengan pelaksanaan GGP.
3. Pada proses pelaksanaan anggaran pendidikan senantiasa diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilakukan secara berdaya guna dan dengan kebijakan yang sah.
4. Dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan keuangan pendidikan Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah dilakukan secara transparan. Transparansidokumen RKAS dan penggunaannya melalui (dipajang dan laporan tertulis secara rutin). Sekolah membuat pembukuan yang tertib, rapi dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada tahapan evaluasi, Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah selalu mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan secara periodik.
5. Pada tahap pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan, setiap kegiatan selalu melibatkan komite sekolah, ketua yayasan, kepala sekolah, Pemerintah/Inspektorat dan masyarakat/orang tua secara transparan.[[35]](#footnote-35)

Hasil survey menunjukkan bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab SPP yang berbeda-beda berikut

Tabel 1.1 Daftar Uang SPP, Sapras/ Bangunan dan Uang pangkal di TK IT Buatanul Ulum T.P. 2017/2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status/Jabatan/Pekerjaan Khusus Karyawan PT.GGP | Nilai Nominal | | |
| SPP | Sapras/  Bangunan | Uang\* Pangkal |
| 1. Karyawan tetap/ Pelaksana | Rp. 95.000,- | Rp. 1000.000,- | Rp. 793.000,- |
| 1. Staf/supervisi/Kasi | Rp. 135.000,- | Rp. 1.500.000,- | Rp. 793.000,- |
| 1. Ka.bag./KA.Bid | Rp. 200.000,- | Rp. 2.400.000,- | Rp. 793.000,- |
| 1. Manajer | Rp. 275.000,- | Rp. 3.150.000,- | Rp. 793.000,- |

Berdasarkan Tabel 1.1 diuraikan Daftar Uang SPP, Sapras/ Bangunan dan Uang pangkal di TK IT Buatanul Ulum T.P. 2017/2018 bahwa:

1. Uang SPP dan Uang Sapras/Bangunan besarnya bertingkat (bersubsidi silang) disesuaikan dengan status dan jabatan/ penghasilan orang tua/wali murid, bagi karyawan PT.GGP Umas Jaya.
2. Wali murid yang keduanya karyawan PT.GGP Umas Jaya yang menjadi standar adalah memiliki jabatan/penghasilan lebih tinggi.
3. Bagi masyarakat umum/ Pegawai negeri disesuaikan dengan karyawan PT.GPP Umas Jaya minimal setara dengan jabatan Staf/Kasi.
4. Bagi pengusaha besar/wiraswasta disesuaikan dengan karyawan PT.GGP Umas Jaya minimal Ka.Bag/Ka.Bid atau manager (disesuaikan penghasilan).
5. Khusus untuk uang bangunan/sapras dapat diangsur 3 kali selama tiga bulan (bulan Oktober-2017 sudah lunas0 dengan angsuran pertama minimal 50% dari jumlah yang telah disepakati.
6. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung kepanitia.[[36]](#footnote-36)

Selanjutnya penyesuaian besaran SPP untuk SD IT Bustanul Ulum Terbanggi Besar TP. 2017/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Uang Infaq SPP, Sapras/ Bangunan dan Uang pangkal di SD IT Buatanul Ulum T.P. 2017/2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Level Pekerjaan** | **Infaq SPP**  **(Rp)** | | | |
| **II** | **III** | **V** | **VI** |
|  | Pelak Harian | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
|  | Staff | 100.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
|  | Kabag/Kasi | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
|  | Manager | 215.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

Berdasarkan Tabel 1.2 Daftar Uang Infaq SPP, Sapras/ Bangunan dan Uang pangkal di SD IT Bustanul Ulum Terbanggi Besar T.P. 2017/2018 bahwa:

1. Bagi Wali murid yang keduanya karyawan PT.GGP Umas Jaya yang menjadi standar adalah memiliki jabatan lebih tinggi.
2. Bagi masyarakat umum, Pegawai negeri disesuaikan dengan Karyawan PT.GPP Umas Jaya minimal setara dengan jabatan Staf/Kasi.
3. Bagi pengusaha besar/wiraswasta disesuaikan dengan karyawan PT.GGP Umas Jaya minimal Ka.Bag/Ka.Bid atau manager (disesuaikan penghasilan)[[37]](#footnote-37)

Selanjutnya penyesuaian besaran SPP untuk SD IT Bustanul Ulum Terbanggi Besar TP. 2017/2018 adalah sebagai berikut:

1. Membayar uang Daftar Ulang disesuaikan pada keadaan sosial ekonomi wali murid dengan perincian sebagai berikut:
2. Uang Kegiatan dan Ekstrakurikuler (1 semester) : Rp. 250.000,-
3. Pemeliharaan dan Praktek Komputer (1 Tahun) : Rp. 80.000,-
4. UKS 1 Tahun : Rp.20.000,-
5. Perpustakaan (1 Tahun) : Rp. 30.000,-
6. Kegiatan Kepramukaan (1 Tahun) : Rp. 50.000,-
7. Membayar Uang Asuransi Siswa\*) selama 1 Tahun : Rp. 20.000,-
8. Membayar Uang SPP/Uang Komite, dan infak/bangunan[[38]](#footnote-38)

Tabel 1.3 Uang SPP/Uang Komite SMP IT Bustanul Ulum Terbanggi Besar 2017/2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Level** | **SPP** |
|  | Pelaksana | 100.000 |
|  | Staff/Kasi | 120.000 |
|  | Ka.Bagian | 180.000 |
|  | Manager | 250.000 |

Berdasarkan hasil prasurvei tersebut yang telah dilakukan, pada dasarnya Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar manajemen pembiayaannya sudah baik, namun perlu analisis lebih rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah telah mengacu pada RAPBS. RAPBS harus mengacu kepada rencana pengembangan sekolah dan termasuk aspek dari rencana operasional tahunan. RAPBS dirancang di sekolah pada tiap tahun dengan meyakinkan bahwa kebutuhan sekolah dapat terpenuhi oleh anggaran secara optimal. Prinsip penyusunan RAPBS, antara lain:

* + - 1. RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran mulu secara jujur, pertanggung jawab dan transparan.
      2. RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelaskan, dan dipajang di tempat terbuka di sekolah.
      3. Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaliknya secara seksama memprioritaskan pembelajar pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah.

Proses penyusunan RAPBS meliputi:

* + - 1. Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah
      2. Menghimpun merangkum dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupan nya.
      3. Menyelesaikan analisis kebutuhan.
      4. Memprioritaskan kebutuhan
      5. Mengkonsultasikan rencana aksi and ditunjukkan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah.
      6. Mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan
      7. Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya), dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahu penerapan hingga evaluasi.[[39]](#footnote-39)

Pembiayaan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar bersumber pada sumber yang jelas yaitu Donatur PT. GGP, sumbangan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggalian dana dari orang tua murid. Proses pelaksanaan anggaran pendidikan senantiasa diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dilakukan secara berdaya guna dan dengan kebijakan yang sah. Pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan keuangan pendidikan Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak-pihak yang berwenang. tahap pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan, setiap kegiatan selalu melibatkan komite sekolah, ketua yayasan, kepala sekolah, Pemerintah/Inspektorat dan masyarakat/orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian disertasi yang telah dilakukan oleh Idhoci Anwar (1990) yang berjudul “Transformasi Biaya Pendidikan dalam Layanan Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (Profil Layanan Tenaga Edukatif dalam Proses Belajar Mengajar Studi Kasus pada IKIP Bandung, UNPAD dan ITB). Temuan dan kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu (1) pola respon tenaga edukatif yang defendif, yaitu tenaga edukatif merasa tidak terikat pada gaji yang diterimanya, serta tidak memanfaatkan sarana dan prasaranan yang optimal; (2) Pola respons yang mekanistik, yaitu tenaga edukatif merasa terikat kepada gaji yang diperoleh berdasarkan nilai ekonomisnya; (3) pola respon yang adaftif yaitu tenaga edukatif menganggap layanan pendidikan yang diberikan sebagai layanan sosial; (4) pola respon yang sinoptik, yaitu tenaga edukatif memandang layanan pendidikan yang diberikannya sebagai ibadah yang didasari keikhlasan; (5) pola respon yang profesional yaitu: tenaga edukatif tergugah lebih berprestasi jika produktivitasnya dan kreativitasnya dihargai. Pada penelitian lain yang berkaitan dengan biaya pendidikan yang telah dilakukan oleh Nanang Fattah (1999) dalam disertasinya yang berjudul “Studi tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar (Analisis Hubungan Pembiayaan Pendidikan dengan Mutu Proses dan Hasil Belajar Siswa SDN Se-Kabupaten Bandung) temuan yang diperoleh dari penelitian adalah

Keadaan dan variasi jumlah penerimaan anggaran biaya pendidikan SD Negeri, menunjukan bahwa sumber dana terbesar yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan SD negeri adalah yang berasal dari pemerintah pusat 90,73 %, orang tua murid (BP3) 6,88 %, pemerintah daerah 2,17%, dan masyarakat 0,40 %. Jumlah biaya operasinal pendidikan yang diperoleh SD Perkotaan dan SD Pedesaan yang bersumber pada pemerintah perbedaannya cukup besar, yaitu 64,75% berbanding 35,25%, dan yang bersumber dari BP3, 88,10% berbanding 11,90%. Kesimpulan dari penelitian Fattah, yaitu komponen-komponen biaya yang cenderung memberikan kontribusi secara signifikan terhadap mutu proses dan hasil belajar sisiwa diwilayah perkotaan, kecamatan, wilayah pedesaan, dan ditingkat sekolah yaitu (1) Gaji/Kesejateraan Pegawai, (2) biaya pembinaan profesional guru, (3) pengadaan bahan pelajaran, (4) Pembinaan kesiswaan, dan (5) biaya pengelolaan sekolah. Sementara komponen-komponan yang cenderung tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan, yaitu (1) pengelolaan alat-alat pelajaran, (2) pengadaan sarana kelas, (3) biaya perawatan tuang kelas, dan (4) biaya pengadaan sarana sekolah.[[40]](#footnote-40)

Dalam penelitian disertasi Yahya yang berjudul “Sistem Manajemen Pembiayan Pendidikan: Suatu Studi tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Sumatra Barat”. Diperoleh kesimpulan bahwa:

(1) Sistem pembiayaan pendidikan yang ada belum memiliki mekanisme yang jelas sebab alokasi dana yang diterima sekolah ada yang diawal, tengah, atau pada akhir tahun ajaran; dan (2) sistem manajemen pembiayaan pendidikan sekolah dasar belum mempertimbangkan tingkat kemampuan membayar (*ability to pay*) pada masyarakat, apakah tergolong mampu atau kurang. Penelitian yang sejalan dengan penelitian Yahya adalah penelitian Wintarsih berjudul “Manajemen Keuangan Sekolah (Studi Manajemen Keuangan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dalam Implementasi Otonomi Daerah di Kota Cirebon” kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Kepala sekolah belum memiliki ruang yang cukup untuk memberdayakan kewenangan dan kekuasaannya yang berhubungan dengan komponen-komponen yang terkait dengan manajemen keuangan sekolah, (2) belum ada pola standar mekanisme untuk merealisasikan anggaran. Realisasi anggaran yang ada pada sekolah masih cenderung terjadi pemindahan mata anggaran, (3) realisasi anggran pada SLTP swasta hampir semua ditanggung oleh orang tua siswa. Walaupun ada bantuan dari pemerintah, misalnya ada sekolah yang mendapat bantuan guru PNS, ada yang mendapat droping DPO atau yang mendapat droping OPF, (4) dana pendidikan yang cukup cenderung memberikan layanan yang lebih baik yang berdampak pada mutu lulusan. Sementara mutu lulusan masih dikaitkan dengan rata-rata NEM yang cukup tinggi, dan (5) di SLTP Negeri belum terlihat sistem pengawasan yang jelas. Walaupun dikatakan ada pengawasan internal dan eksternal, pengawasan itu tidak dilakukan secara rutin. Sementara di SLTP swasta pihak yayasan sebagai pengelola dan sekolah sebagai pelaksana, pengawasan keuangan langsung diawasi oleh yayasan sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih mudah diawasi.[[41]](#footnote-41)

Dalam penelitian disertasi Maman Rusmana yang berjudul “Sistem pembiayaan pendidikan pada pemerintah kabupaten dengan mengambil studi di kabupaten Garut. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah:

Belum ada penghitungan alokasi anggaran yang mengacu pada pencapaian tujuan sebagai bagian dari pencapaian visi dan misi pendidikan kabupaten Garut. Anggaran pembiayaan pendidikan yang fluktuatif sehingga pengusulan anggaran cenderung bersifat spekulatif, tidak mendapat kepastian besaran anggaran; (2) ditingkat sekolah terjadi duplikasi anggaran yang bersumber dari pemerintah dan yang bersumber dari masyarakat. Jumlah perolehan danan dari BP3 bisa lebih besar dibandingkan perolehan resmi dari pemerintah; (3) dilihat dari model dan mekanisme pembiayaan pendidikan, pada pemerintah kabupaten Garut menunjukkan bahwa model pengalokasian dan pendistribusian dana pendidikan yang diterima oleh satuan pendidikan (sekolah) cenderung sama dengan sebelum kebijakan otonomi daerah; belum ada strategi yang jelas sebagai acuan teoritis dan konsensional untuk menyusun mekanisme alokasi dan pendistribusian anggaran ditingkat pengambil kebijakan untuk sampai ke satuan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan dan target yang konsisten dengan visi dan misi pendidikan pada pemerintah kabupaten Garut.[[42]](#footnote-42)

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaran pendidikan, pembiayaan serta keuangan adalah kemampuan penentu dan juga menjadi aspek tak terelakkan pada kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan serta pembiayaan di jenjang satuan pendidikan adalah komponen produksi yang menjadi penentu berjalannya berbagai kegiatan pada PBM di sekolah berikut dengan komponen lainnya. Maka, dengan sadar atau tidak tiap aktivitas yang dilaksanakan oleh sekolah membutuhkan dana. Komponen pembiayaan serta keuangan tersebut penting untuk dimana upaya terbaik sehingga biaya yang ada bisa dengan optimal dialokasikan gun menunjang terwujudnya tujuan pendidikan. Adapun manajemen menurut Thomas H. Jones memiliki 3 tahapan yaitu 1) Perencanaan keuangan (*budgeting*); 2) implementasi (*accounting*); 3) penilaian (*auditing*).[[43]](#footnote-43) yang meliputi: a) Manajemen sekolah; b) Bahan Penunjang Pembelajaran; c) Praktikum Pengajaran; d) Pemeliharaan dan perbaikan sarana akademik; e) Fasilitas Belajar (buku, media, alat); f) Penunjang daya dan jasa; g) Personel-Sekolah (gaji, tunjangan); h) Ujian-ujian sekolah.

Berdasarkan prasurvei Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah memiliki perencanaan yang baik dimana Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) telah disusun dan dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Adapun unsur RAPBS yang terbagi dalam (1) Belanja Rutin, yaitu: over head, ekskul, dan insentive; (2) Investasi, yaitu: Bangunan, peralatan, dan kendaraan; dan (3) Pendapatan, yaitu: siswa, pemerintah, swasta, usaha sekolah, dan Yayasan Keluarga Muslim (YKM).

Berdasarkan teori ahli penyusun hendaknya mengikuti langkah-langkah yang tepat untuk menetapkan RAPBS sebagai berikut:

1. Mungkin bisa antar isolasi rencana yang akan dilaksanakan
2. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
3. Menentukan program kerja ya dan rincian program
4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
5. Menghitung dana yang dibutuhkan
6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.[[44]](#footnote-44)

Rencana tersebut adalah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS).Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan kegiatan di lingkungan sekolah paling tidak harus memuat nama atau informasi sebagai berikut:

1. Informasi rencana kegiatan sasaran orang yang rencana kegiatan, tanggung jawab, rencana baru atau lanjutan.
2. Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program.
3. Informasi kebutuhan:barang/jasa yang dibutuhkan volume kebutuhan.
4. Dada kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan.
5. Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, rencana kegiatan dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan.
6. Sumber dana total: bersumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program.[[45]](#footnote-45)

Berdasarkan fenomena dan fakta nyata yang ada di lapangan yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik untuk mencoba merepresentasikan bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan dan keunikan yang ada di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah secara lebih mendalam, oleh karena itu peneliti terdorong untuk mengkaji manajemen pembiayaan disekolah tersebut, sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu: “Model Manajemen Pembiayaan Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah”.

1. **Fokus Penelitian**

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini adalah manajemen pembiayaan yang dilaksanakan di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah. Adapun subfokus penelitian ini meliputi:

1. Perencanaan keuangan (*budgeting*) pendidikan berdasarkan 8 komponen yang meliputi: a) Manajemen sekolah; b) Bahan Penunjang Pembelajaran;

c) Praktikum Pengajaran; d) Pemeliharaan dan perbaikan sarana akademik; e) Fasilitas Belajar (buku, media, alat); f) Penunjang daya dan jasa; g) Personel-Sekolah (gaji, tunjangan); h) Ujian-ujian sekolah.

1. Implementasi (*accounting*) meliputi: a) Manajemen sekolah; b) Bahan Penunjang Pembelajaran; c) Praktikum Pengajaran; d) Pemeliharaan dan perbaikan sarana akademik; e) Fasilitas Belajar (buku, media, alat); f) Penunjang daya dan jasa; g) Personel-Sekolah (gaji, tunjangan); h) Ujian-ujian sekolah
2. Penilaian (*Auditing*) yang meliputi: a) Manajemen sekolah; b) Bahan Penunjang Pembelajaran; c) Praktikum Pengajaran; d) Pemeliharaan dan perbaikan sarana akademik; e) Fasilitas Belajar (buku, media, alat); f) Penunjang daya dan jasa; g) Personel-Sekolah (gaji, tunjangan); h) Ujian-ujian sekolah?
3. Model manajemen pembiayaan pendidikan.
4. **Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana manajemen pembiayaan yang dilaksanakan di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah dengan uraian pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan keuangan (*budgeting*) pendidikan yang meliputi: a) Manajemen sekolah; b) Bahan Penunjang Pembelajaran; c) Praktikum Pengajaran; d) Pemeliharaan dan perbaikan sarana akademik; e) Fasilitas Belajar (buku, media, alat); f) Penunjang daya dan jasa; g) Personel-Sekolah (gaji, tunjangan); h) Ujian-ujian sekolah?
2. Bagaimana implementasi (*accounting*) yang meliputi: a) Manajemen sekolah; b) Bahan Penunjang Pembelajaran; c) Praktikum Pengajaran; d) Pemeliharaan dan perbaikan sarana akademik; e) Fasilitas Belajar (buku, media, alat); f) Penunjang daya dan jasa; g) Personel-Sekolah (gaji, tunjangan); h) Ujian-ujian sekolah?
3. Bagaimana penilaian (*Auditing*) yang meliputi: a) Manajemen sekolah; b) Bahan Penunjang Pembelajaran; c) Praktikum Pengajaran; d) Pemeliharaan dan perbaikan sarana akademik; e) Fasilitas Belajar (buku, media, alat); f) Penunjang daya dan jasa; g) Personel-Sekolah (gaji, tunjangan); h) Ujian-ujian sekolah?
4. Bagaimana model manajemen pembiayaan pendidikan?
5. **Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti akan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan keuangan (*budgeting*) pendidikan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi (*accounting*).
3. Mengidentifikasi dan menganalisis penilaian (*Auditing*).
4. Membuat model manajemen pembiayaan pendidikan.

**2. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi teoritik berupa penyajian informasi ilmiah tambahan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, serta untuk memperkaya khasanah teoritis tentang konsep manajemen pembiayaan di Sekolah Islam Terpadu Bustanul Ulum Terbanggi Besar Lampung Tengah

1. Sebagai acuan bagi sekolah dalam merencanakan anggaran pendidikan.
2. Sebagai acuan bagi sekolah dalam mengelola penerimaan sumber dana pendidikan.
3. Sebagai acuan bagi sekolah dalam implementasi anggaran pendidikan yang telah disusun.
4. Sebagai acuan bagi sekolah dalam penilaian (*Auditing*) anggaran pendidikan khususnya di Sekolah Islam Terpadu.
5. Model yang diperoleh dijadikan acuan bagi sekolah dalam memperbaiki manajemen pembiayaan pendidikan.

1. Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 77 [↑](#footnote-ref-1)
2. Nanang Fattah, *Op.cit.,* h.78 [↑](#footnote-ref-2)
3. Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya,* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), h. 887 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Tafsir. *Filsafat Pendidikan Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 295 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, Dan Mutu Sekolah*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 13 No.2 Tahun 2016. h. 27 [↑](#footnote-ref-5)
6. Akdon. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*.(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.23 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ferdi W. P. *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education: A Theoritical Study.*Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013. h. 571 [↑](#footnote-ref-7)
8. Baharudin. *Manajemen Pendidikan Islam*. (Malang: UIN Maliki Press. 2010) h.128 [↑](#footnote-ref-8)
9. Akdon. *Op.cit.* h. 26 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. h.37 [↑](#footnote-ref-10)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. 2008. h. 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Uhar Suryasaputra. *Administrasi Pendidikan Edisi Revisi.* (Bandung. Refika Aditama. 2013). h. 23 [↑](#footnote-ref-12)
13. Iman Gunawan. Manajemen Pendidikan suatu Pengantar Praktek. (Bandung:CV Alfabeta, 2017) h. 346 [↑](#footnote-ref-13)
14. Nanang Fattah. *Landasan Manajemen Pembiayaan.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). h. 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan konsep dan aplikasinya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014). h.4 [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 793-794 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. Matin, h. 5 [↑](#footnote-ref-17)
18. Udin Syaefudin Sa’ud dan Abin Syamsuddin Makmun. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif.* (Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2009). h. 3-4 [↑](#footnote-ref-18)
19. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 474 [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 377 [↑](#footnote-ref-20)
21. Op cit. Imam Gunawan, dkk. h. 44-47 [↑](#footnote-ref-21)
22. Veithzal Rivai. Islamic Financial Management, teori, konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa. (Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2008). h. 203-204 [↑](#footnote-ref-22)
23. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 851 [↑](#footnote-ref-23)
24. Matin. *Op. cit.* h.6 [↑](#footnote-ref-24)
25. Veithzal Rivai. Op cit. h. 385-414 [↑](#footnote-ref-25)
26. Veithzal Rivai. Op cit. h. 205-206 [↑](#footnote-ref-26)
27. Veithzal Rivai. Op cit. h. 205-206 [↑](#footnote-ref-27)
28. Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 876 [↑](#footnote-ref-28)
29. Luluk Atirotu Zahroh. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini. (Jogjakarta, Lentera Kreasindo. 2014). h.26-27 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. h. 27 [↑](#footnote-ref-30)
31. Jamiludin Usman. *Urgensi Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*. Tadrîs *Volume 11 Nomor 2 Desember 2016. h.* 220 [↑](#footnote-ref-31)
32. Sagala, Syaiful. Manajemen strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. (Bandung: Alfabeta. 2009). h. 170. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mansur, dan Mahfud Junaidi. Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Agama Islam, 2005) h. 165 [↑](#footnote-ref-33)
34. Luluk Atirotu Zahroh. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Usia Dini, (Yogyakarta: Lingkar Media, 2014) h. 26 [↑](#footnote-ref-34)
35. Hasil wawancara dengan Suripto Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah. [↑](#footnote-ref-35)
36. Dokumen Sekolah TK Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah. [↑](#footnote-ref-36)
37. Dokumen Sekolah SD Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah [↑](#footnote-ref-37)
38. Dokumen Sekolah SMP Islam Terpadu Bustanul Ulum Lampung Tengah [↑](#footnote-ref-38)
39. Mohamad Mustari. Manajemen Pendidikan. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), h.190-192 [↑](#footnote-ref-39)
40. Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media. 2016). h.133-134 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid. Mulyono. h. 135-139 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid. Mulyono. h. 143-147 [↑](#footnote-ref-42)
43. Dadang Suhardan, dkk. Manajemen Pendidikan. Bandung. Alfabeta. 2013. h. 257 [↑](#footnote-ref-43)
44. Mohamad Mustari. Op cit. h.190-191 [↑](#footnote-ref-44)
45. Mohamad Mustari. Op Cit. h.192 [↑](#footnote-ref-45)